

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEOPLE POWER (GEN-Z) DI ASIA TENGGARA: STUDI KASUS DEMONSTRASI FILIPINA

Revaldy Putra Razwa¹, Muhammad Taufik Akbar², Elly Nurlia³, Muhammad Ibnu Maulana⁴, Muhammad Satrio Adhi Wicaksono⁵

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

6670230030@untirta.ac.id¹

6670230019@untirta.ac.id²

ellynurlia@untirta.ac.id³

6670230003@untirta.ac.id⁴

6670230116@untirta.ac.id⁵



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author..

Abstract

This study examines the social media role within the phenomenon of people power among Generation Z in Southeast Asia, taking as a case study anti-corruption rallies in the Philippines. The advent of digital technology and social media altered political communication practices and people's involvement in politics, particularly among the young generation, wherein digital platforms become a means of coordination, information dissemination, and mass mobilization. This study takes into account the manner in which solidarity is strengthened, political awareness enhanced, and social action encouraged by social media among Gen-Z in the Philippines as a response to the mega-corruption scandal in a natural disaster project. The findings reveal that social media not only functions as a digital activism strategy tool but also as a new political space that is conflicting with traditional power relations. Simultaneously, however, difficulties such as misinformation proliferation have cropped up as a negative aspect of this advancement. An understanding of these forces is necessary to help create adaptive activist policy and strategies for the digital era.

Key Words: Social Media, People Power, Generation Z, Digital Activism

Abstrak

Studi ini mengkaji peran media sosial dalam fenomena kekuatan rakyat di kalangan Generasi Z di Asia Tenggara, dengan mengambil studi kasus demonstrasi antikorupsi di Filipina. Kemunculan teknologi digital dan media sosial telah mengubah praktik komunikasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam politik, terutama di kalangan generasi muda, di mana platform digital menjadi sarana koordinasi, penyebaran informasi, dan mobilisasi massa. Studi ini mempertimbangkan bagaimana solidaritas diperkuat, kesadaran politik ditingkatkan, dan aksi sosial didorong oleh media sosial di kalangan Generasi Z di Filipina sebagai respons terhadap skandal mega-korupsi dalam sebuah proyek bencana alam. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat strategi aktivisme digital, tetapi juga sebagai ruang politik baru yang bertentangan dengan relasi kuasa tradisional. Namun, di saat yang sama, kesulitan seperti penyebaran misinformasi telah muncul sebagai aspek negatif dari kemajuan ini. Pemahaman tentang kekuatan-kekuatan ini diperlukan untuk membantu menciptakan kebijakan dan strategi aktivis yang adaptif di era digital.

Kata Kunci: Media Sosial, People Power, Generasi Z, Aktivisme Digital

Pendahuluan

Perkembangan era digital terus berlanjut, dan banyak teknologi terus berkembang untuk menjadi lebih baik atau lebih otomatis. Hal ini memungkinkan perkembangan terjadi di setiap bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, politik pemerintahan. Selain itu terdapat satu bidang yang pasti ada diantara bidang yang telah disebutkan, yakni komunikasi (Juditha & Darmawan, 2019). Mengapa demikian?, sebab komunikasi memegang peranan penting dalam menghubungkan antar individu serta meraih informasi dengan jangkauan yang luas. Komunikasi adalah salah satu bidang yang mengalami perkembangan melesat selama era digital. Di masa lalu, kita harus menggunakan handphone dan komunikasi antar sim untuk terhubung dengan dunia luar. Namun sekarang dunia semakin mudah dengan kehadiran berbagai teknologi komunikasi yang sangat efisien (Harris, M, 2021).

Setelah membahas perkembangan era digital dalam lingkup menyeluruh, penulis membawa pembaca untuk dapat menelisik kondisi di Asia Tenggara. Evolusi media sosial selama sepuluh tahun terakhir sangatlah mendalam dan transformatif. Dengan semakin luasnya akses internet dan penetrasi perangkat seluler, individu di kawasan ini kini dapat saling terhubung secara instan, bertukar informasi, dan mengekspresikan pandangan politik dengan lebih mudah dan luas (Alvinto et al, 2023). Situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah muncul sebagai instrumen kunci untuk memengaruhi opini publik dan meningkatkan keterlibatan politik. Perubahan ini membawa sistem komunikasi tatap muka konvensional ke komunikasi digital yang lebih dinamis dan cepat. Namun, sejalan dengan perkembangan ini, muncul pula isu-isu seperti meningkatnya penyebaran disinformasi, manipulasi informasi, dan polarisasi sosial yang menguji demokrasi dan kohesi sosial di kawasan tersebut (Gunawan & Ratmono, 2021).

Mengerucut pada negara Filipina, dimana terjadi protes massal pada bulan September lalu menyoroti kekhawatiran mendalam atas korupsi dana penanggulangan bencana alam, yang mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah (Guinto & Simonetta, 2025). Hal ini khususnya terjadi ketika demonstrasi dipimpin dan diorganisir oleh kaum muda yang secara aktif menggunakan media sosial sebagai media utama untuk menyebarkan berita dan mengungkap fakta. Mereka mampu mengorganisir aksi lapangan dengan cepat dan efektif, menyebarkan gerakan ke wilayah lain, dan bersatu dalam solidaritas lintas batas geografis di platform daring. Media sosial juga memfasilitasi diskusi tingkat tinggi, yang memperkuat persepsi kolektif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Tetapi, peran media sosial ini juga bermasalah karena memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak berdasar sehingga memicu ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik (Hanafi & Rahim, 2017).

Analisis ini mencoba mengidentifikasi peran media sosial dalam membangun fenomena kekuatan rakyat di antara Gen-Z Filipina, dan bagaimana dinamika ini mencerminkan tren baru dalam aktivisme digital di Asia Tenggara. Pertanyaan yang dapat dijawab adalah bagaimana platform digital memengaruhi keterlibatan kaum muda dalam aksi politik, khususnya ketidakpuasan dan mobilisasi gerakan massa. Pembahasan ini menunjukkan jejaring sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun solidaritas mengoordinasikan aksi, dan memperkuat identitas kolektif kaum muda. Tren ini menunjukkan bahwa Generasi Z Filipina memanfaatkan teknologi untuk memperluas ruang politik dan menghadapi bentuk-bentuk kekuasaan tradisional dengan implikasi yang kuat bagi transformasi politik di kawasan Asia Tenggara (Riyanti et al, 2023).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi literature. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengidentifikasi peran media social dalam membangun fenomena people power di kalangan Gen Z Filipina dan menganalisis dinamika tren baru dalam activism digital di Asia Tenggara. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literature, pendekatan ini relevan karena keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis dan sintesis dari berbagai sumber tertulis seperti artikel, jurnal, berita dan sumber lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam konteks penelitian ini adalah teori dan konsep utama yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan berita yang membahas tentang perkembangan era digital, media sosial, aktivisme Gen-Z, dan studi kasus demonstrasi Filipina. Data sekunder ini menjadi dasar

penting dalam membangun pemahaman dan analisis mengenai pengaruh media sosial terhadap people power Gen-Z di Asia Tenggara

Teknik pengumpulan data pada Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada makna sosisl dan dinamika politik yang muncul dari aktivitas digital generasi muda di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks demonstrasi anti korupsi di Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif memungkinkan peneliti dapat menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles, Huberman (1992). yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan merangkum literatur yang paling relevan untuk memfokuskan kajian pada isu-isu sentral seperti mobilisasi digital, solidaritas siber, dan pergeseran pola partisipasi politik. Tahap penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil kajian dalam bentuk deskripsi naratif yang menghubungkan antar konsep secara logis. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data secara kritis untuk menemukan makna teoretis dan empiris mengenai bagaimana media sosial membentuk praktik politik generasi Z dalam konteks people power.

Hasil dan Pembahasan

Teori Castells (2012) tentang gerakan sosial berjejaring mendefinisikan bahwa media soisal adalah platform tempat individu bertemu untuk tujuan bersama tanpa memerlukan kelompok organisasi resmi. Keterlibatan politik dalam kasus Gen-Z tidak lagi bergantung pada teknologi tradisional, melainkan terjadi atas dasar solidaritas digital yang dipupuk melalui interaksi siber (Castells, M, 2012). Kesadaran moral terhadap kepentingan publik merupakan pendorong utama aktivisme mereka, dengan media sosial membantu pertukaran informasi sentral dan dukungan yang cepat dalam skala besar. Teknologi ini memerlukan fleksibilitas, desentralisasi, dan kemampuan mobilisasi, sehingga aktivisme digital kaum muda bersifat dinamis dan peka terhadap perkembangan sosial dan politik. Teori ini relevan untuk memahami evolusi praktik politik di era digital saat ini.

Permasalahan yang terjadi di Filipina sangat mirip dengan apa yang selalu terjadi di Indonesia yakni mega korupsi. Penulis menganggap bahwa korupsi di beberapa negara maju atau berkembang sebagai suatu hal yang lumrah, karena sudah menjadi hal biasa bagi pejabat pemerintah untuk melakukannya (Prasetyo & Marselina, 2017). Seperti yang disebut diawal, terdapat skandal mega korupsi yang menimpa Filipina, yakni terkait anggaran penanganan bencana alam. Semenjak Marcos Jr menduduki kursi presiden pada 2022. Seiring berjalan nya waktu, pemerintahannya meluncurkan 9.855 proyek infrastruktur pengendalian banjir di penjuru negeri senilai (US\$9,5 miliar). Sebelum 2022 proyek terkait banjir telah terlaksana dahulu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak proyek pengendalian banjir tidak dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak dimulai sama sekali, meskipun dana telah dicairkan. Kekhawatiran tentang kemungkinan korupsi meningkatkan sebagai akibat dari temuan ini (Bloomberg, Writer, 2025)

Kesaksian yang diberikan pada sidang senat menunjukkan adanya konflik yang signifikan antara kontraktor bangunan swasta, politikus, dan insinyur pemerintah yang diduga menerima suap besar dari proyek pengendalian banjir (Planasari, Sita, 2025). Mantan insinyur pemerintah buka suara, setidaknya 25% dari anggaran setiap proyek secara teratur dikorupsi sebagai suap. Seringkali, biaya dikurangi dengan menggunakan material berkualitas rendah atau biaya

konstruksi digelembungkan secara administratif untuk menutupi dana yang hilang. Hal investigasi ini menyadarkan warga Filipina, salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Bagi negara yang mengalami sekitar 20 badai tropis setiap tahun, proyek-proyek pengendalian banjir ini dianggap sangat krusial (Fatunnisa, Hani, 2025).

Masyarakat Filipina yang sadar akan bencana di negara nya, dan proyek-proyek untuk menanganinya malah di korupsi oleh pihak rakus. Maka mereka melakukan demonstrasi selama 7 hari lamanya, dimulai 15 September hingga puncak pada 21 September (Prinada, Yuda, 2025). Lokasi demonstrasi tersebar di berbagai sudut kota, seperti Manila, Cebu, Quezon City, dan lainnya. Seluruh elemen masyarakat turun ke jalan, tak luput mahasiswa pun sama yakni dari University of the Philippines, mereka aksi di halaman UP Cebu di sepanjang Gorordo Avenue (Nugraha, Fajar, 2025). Puncak demonstrasi ditetapkan pada 21 September, sejumlah kelompok nasional termasuk kelompok pemuda akan menggelar demonstrasi besar besaran yang akan digelar di Rizal Park pukul 09.00 pagi waktu setempat. Aksi ini akan dinamakan Bilyon People March atau Bayan (Sancaya, Rengga, 2025). Tanggal ini bukanlah tanpa dasar tetapi didasari oleh peristiwa kelam yang terjadi 1972 silam yakni darurat militer. Pada saat itu Filipina menghadapi ancaman serius berupa meningkatnya aksi pemberontakan kelompok komunis. Tanggal 21 September 1972 dipilih Marcos sebagai simbol kekuasaan karena dianggap "tanggal keramat" dalam kepercayaan pribadinya (Argus, Array A, 2025).

Gambar 1. Demonstrasi Masyarakat Filipina



Sumber: GMA News (TikTok)

Media sosial memainkan peran kunci dalam memobilisasi kemarahan publik untuk berpartisipasi dalam protes di Filipina atas dugaan mega korupsi dalam proyek-proyek manajemen bencana alam. Youtube, Facebook, X, dan TikTok berfungsi sebagai platform utama untuk penyebaran informasi yang cepat dan luas, guna mengungkapkan contoh-contoh korupsi, yang memunculkan reaksi publik yang emosional (Sudirman, L, 2023). Kemarahan publik individual yang awalnya diarahkan menjadi tindakan kolektif ketika berbagai segmen terutama kaum muda menggunakan media sosial untuk mengoordinasikan dan membangun antardaerah. Bagi masyarakat yang tidak sempat untuk membersamai turun ke jalan, tentu juga dapat melakukan demonstrasi melalui media sosial Instagram. Dengan fitur yang selalu fresh, sangat menguntungkan kami dalam mengudarakan kampanye ketidakpercayaan kepada pemerintah (Saad et al., 2020).

Seperti yang sudah dijelaskan, mobilisasi protes massa di era digital menjadi lebih efektif berkat kapabilitas yang tersedia di platform media sosial. Fitur-fitur seperti grup diskusi, pengaturan acara, live stream, dan hashtags memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan terorganisasi (Kahar, S. A, 2025). Grup diskusi dan halaman khusus menyediakan ruang koordinasi bagi para aktivis untuk mengorganisir dan berbagi informasi terkini. Pembuatan acara memudahkan pengumuman lokasi dan waktu demonstrasi kepada publik, sehingga meningkatkan kesiapan peserta (Widiastuti, V, et al, 2025). Live streaming memudahkan promosi aksi secara langsung, sehingga meningkatkan kesadaran dan dukungan global. Hashtags

telah memainkan peran penting dalam menciptakan alat yang sangat diperlukan untuk mempromosikan solidaritas dan memperkuat narasi gerakan di tingkat internasional dan nasional. Semua fitur ini menciptakan jaringan digital yang dinamis dan adaptif, memungkinkan mobilisasi massa yang lebih efektif tanpa bergantung pada organisasi formal, serta memperluas jangkauan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara massal (Fatimah, S, 2025)

Gambar 2. Masyarakat memegang poster pada saat demonstrasi



Sumber: Kompas.com

Protes antikorupsi di Filipina dalam rangkap tanggap bencana merupakan gambaran kecil dari tren yang lebih luas di Asia Tenggara, karena Gen-Z di Indonesia, Thailand, dan Myanmar juga memanfaatkan media sosial sebagai ruang inti untuk aktivisme digital dan ekspresi politik (Masan, A. M. K, 2025) Di sana, media sosial menjadi ruang strategis yang memungkinkan kaum muda meyarakan kritik, mengorganisir protes, dan menciptakan solidaritas lintas batas. Konteks politik dan sosial yang berbeda cenderung mendorong munculnya gerakan sosial berbasis digital, yang tidak lagi bergantung pada mekanisme tradisional tetapi memanfaatkan jaringan daring (Morissan, M, 2014). Aktivisme daring Generasi Z di Asia Tenggara merupakan paradigma tentang bagaimana mereka menyikapi kehidupan politik, menggabungkan teknologi dan kesadaran sosial dalam upaya mereka untuk reformasi. Tren ini membuktikan bahwa media sosial merupakan platform integral untuk membangun kesadaran politik dan gerakan demokrasi di kawasan tersebut (Anshori, I & Nadiyya, F, 2023)

Kesimpulan

Media sosial telah membuktikan peran strategis dalam memobilisasi generasi Z di Filipina untuk terlibat dalam aksi people power, khususnya dalam konteks penanggulangan korupsi proyek bencana alam. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat koordinasi dan penguatan solidaritas yang efektif di antara kaum muda. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam pola partisipasi politik di Asia Tenggara, di mana aktivisme digital menjadi kunci baru dalam perjuangan demokrasi. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat tetap perlu diantisipasi agar media sosial tetap menjadi ruang publik yang konstruktif dan demokratis. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika ini penting sebagai landasan pengembangan kebijakan dan strategi aktivisme yang adaptif di era digital.

Daftar Pustaka

- Argus, Array A. 2025. Demo Filipina 21 September 2025 Mengingat Kembali Revolusi People Power. Available at: https://medan.tribunnews.com/tribun-medan-wiki/1760726/demo-filipina-21-september-2025-mengingat-kembali-revolusi-people-power?lgn_method=google&google_btn=onetap, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Anshori, I., & Nadiyya, F. A. A. (2023). Peran ruang digital sebagai transformasi gerakan aksi sosial mahasiswa melalui platform sosial media. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2)
- Alvinto, B., Rusta, A., & Fajri, M. (2023). The Influence of Social Media on People's Political Behavior. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 89-95
- Bloomberg, Waiter. 2025. Di Balik Skandal Korupsi Penanggulangan Banjir Filipina. Available at: <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/85177/di-balik-skandal-korupsi-penanggulangan-banjir-filipina>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86.
- Fatunnisa, Hani. 2025. Ribuan Warga Filipina Protes Korupsi Proyek Banjir Fiktif. Available <https://rmol.id/dunia/read/2025/09/21/680639/ribuan-warga-filipina-protes-korupsi-proyek-banjir-fiktif>, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth (2021)*. Kepustakaan Populer Gramedia
- Guinto, Joel & Simonette, Virma. 2025. Banjir Filipina Bongkar Kongkalikong Pejabat dan Kontraktor - 'Gaji Dipotong Pajak Ternyata Dinikmati Politikus Korup'. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62l660d8jxo>, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Harris, M. 2021. Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat!. Available at: https://www.gramedia.com/literasi/eradigital/?srsId=AfmBOoqAKUCEvCgge1gEkZdLLYJfRW6lJ6Y1g0L_bZLwgVkslle_d1lQ, diakses tanggal 19 Oktober 2025
- Hanafi, K., & Rahim, H. A. (2017). PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA GERAKAN SOSIAL OLEH PEMIMPIN PELAJAR UNIVERSITI DI BANDAR PEKAN BARU, RIAU, INDONESIA. *e-BANGI Journal*, 12(2)
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2019). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Use of Digital Media and Political Participation. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 1-17
- Kahar, S. A. (2025). Mobilisasi Aksi Protes Massal Melalui Fitur Template di Instagram. *Emik*, 8(1), 1-23
- Masan, A. M. K. (2025). PERAN GENERASI MUDA DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA. *TheJournalish: Social and Government*, 6(3), 283-289
- Morissan, M. (2014). Media sosial dan partisipasi sosial di kalangan generasi muda. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 50-68

- Nugraha, Fajar. 2025. Demo di Filipina Berujung Rusuh, Bendera One Piece Berkibar. Available at: <https://www.metrotvnews.com/read/kewCMA7y-demo-di-filipina-berujung-rusuh-bendera-one-piece-berkibar>, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Planasari, Sita. 2025. Filipina Bentuk Komisi Independen Selidiki Skandal Proyek Pengendalian Banjir. Available at: <https://www.tempo.co/internasional/filipina-bentuk-komisi-independen-selidiki-skandal-proyek-pengendalian-banjir-2069584>, diakses tanggal 20 Oktober 2025
- Prinada, Yuda. 2025. Rakyat Filipina Demo Massal 15-21 September 2025, Apa Pemicunya?. Available at: <https://tirto.id/rakyat-filipina-demo-massal-15-21-september-2025-apa-pemicunya-hhQc>, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Prasetyo, T., & Marselina, M. (2022). Adakah Perbedaan Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengendalian Korupsi antara Negara Maju, Menengah dan Miskin?. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 191-197
- Riyanti, R., Luthfi, A., & Rohana, D. (2023). Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-31
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik Pada Generasi Muda: Perspektif Indonesia. *Society*, 8(1), 87-97
- Sancaya, Rengga. 2025. Keluarga Tahanan Demo 21 September Tuntut Pembebasan di Manila. Available at: <https://news.detik.com/foto-news/d-8125062/keluarga-tahanan-demo-21-september-tuntut-pembebasan-di-manila>, diakses tanggal 14 Oktober 2025
- Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40
- Widiastuti, V., Ayuningtyas, F., & Muqsith, M. A. (2025). Resepsi Khalayak Pesan Propaganda Perlawanan Simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat di Akun Instagram@narasinewsroom. *Communication*, 16(1), 29-43